

8 WAJAH
SP ASDP:
RINDU KEMBALI
BERSATU

10 KINERJA
PT BUKIT ASAM:
SIAP MELOMPAT LEBIH
TINGGI

12 REGULASI
MEMANGKAS
BELITAN BIROKRASI
BUMN

20 SAJIAN KHUSUS
LORONG BERLIKU
IMPLEMENTASI
UU BPJS

GARDA BUMN

MEDIA KOMUNIKASI, ADVOKASI, DAN EDUKASI PEKERJA BUMN

EDISI No. 012 • Desember • 2011 Rp 10.000,-

BEGITU DIANGKAT SEBAGAI MENTERI BUMN, DAHLAN ISKAN LANGSUNG TANCAP GAS, MEMBAWA PERUSAHAAN PELAT MERAH ITU KE JALUR BEBAS HAMBATAN, AGAR BISA MELAJU DENGAN CEPAT. ALUR BIROKRASI YANG SELAMA INI DIRASAKAN MENGHAMBAT, DIPANGKAS DENGAN KEBIJAKAN PENDELEGASIAN WEWENANG. TIDAK ADA ALASAN LAGI BAGI DIREKSI SETIAP BUMN, UNTUK MEMACU KINERJA PERUSAHAAN DALAM KECEPATAN RENDAH.

**MENARIK
BUMN
KE JALUR CEPAT**

● **Dahlan Iskan, Menteri BUMN**



☐ Lensa



Rapat Kerja SP-ASDP dihadiri Ketua Umum FSP BUMN, Ketua SP ASDP dan Direksi PT ASDP.



PT Pelindo III Surabaya, menggelar pelatihan dan sertifikasi ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (AK3) pada 5 sampai 15 Desember 2011.



Menteri Dahlan Iskan melantik Dirut PT PLN di Gardu PLN, sebuah acara pelantikan unik yang mengisyaratkan agar Dirut PLN langsung bekerja.

TERPILIHNYA DAHLAN ISKAN sebagai Menteri BUMN dalam reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II, mendapat respons luar biasa dari publik. Hampir semuanya menyatakan sambutan baik. Tentu saja, bukan hanya karena gaya mantan jurnalis itu yang kelihatan *nyeleneh*, mulai dari gaya berpakaian sampai penolakan memanfaatkan fasilitas negara. Tapi juga karena kapasitasnya, yang sudah terbukti mampu membawa PT PLN ke kinerja yang jauh lebih cemerlang dari sebelumnya.

Dengan sikapnya yang cenderung *nothing to lose*, Dahlan Iskan juga dipercaya bakal sanggup menghalau intervensi dari kekuatan mana pun, suatu hal yang selama ini selalu merongrong BUMN, sehingga BUMN kerap mendapat julukan sapi perah.

Tidak lama setelah menjalankan tugasnya sebagai Menteri BUMN, Dahlan Iskan langsung menggebrak dengan melansir kebijakan yang isinya berupa pelimpahan wewenang. Kebijakan ini, merupakan terobosan yang –bisa dikatakan– “revolusioner” untuk memangkas jalur birokrasi dalam pengelolaan BUMN.

Tentu saja, banyak yang menyambut baik “langkah besar” yang diayunkan Dahlan Iskan tersebut, yang diyakini bakal membuat setiap BUMN bisa bergerak lebih lincah. Namun, ada juga beberapa gelintir pihak yang mencoba bersikap kritis, dengan melemparkan kekhawatiran potensi terjadinya penyimpangan. Dengan pengawasan yang diperlonggar, komisaris dan direksi BUMN memang bisa lebih leluasa menjalankan aksinya.

Memang, eksekusi negatif selalu ada. Bahkan untuk sebuah keputusan yang dianggap paling baik sekalipun. Bagi kalangan SP BUMN, justru di sinilah kita dituntut untuk berperan lebih aktif, terutama dalam “mengawasi” gerak perusahaan, sehingga bisa dipastikan berjalan di atas trek yang benar.

Akhirnya, kepada Menteri Dahlan Iskan, kami ucapkan selamat datang, dan selamat menjalankan tugas berat dalam mengembangkan BUMN. Kepada pembaca, khususnya rekan-rekan SP BUMN, mari kita sambut kepemimpinan baru di Kementerian BUMN, dengan bergerak lebih proaktif lagi. Salam pekerja. **EB**

☐ DAFTAR ISI

SOROT	3-6
WAJAH	8-9
KINERJA	10-11
REGULASI	12-14
ETOS	15
DINAMIKA	16-17
ADVOKASI	18-19
SAJIAN KHUSUS	20-23
FIGUR	24-25
RESENSI	26
SIKAP	27

GARDA BUMN

MEDIA KOMUNIKASI, ADVOKASI, DAN EDUKASI PEKERJA BUMN

Pemimpin Umum/ Penanggung Jawab: Abdul Latif Algaff

Penasehat : Faisal Bahalwan

Pemimpin Redaksi : M. Munif

Anggota Redaksi : Lakoni Brama

Bisman Sinurat, Josem Ginting, Abdul Sadat, Tomy Tampatty

Sekretaris Redaksi : Eko Nugriyanto

Kuangan : Hidayattullah Putra

Sirkulasi : Maliki S, Rudy Firmana

Diterbitkan Federasi Serikat Pekerja BUMN

Alamat Redaksi : Gedung JAMSOSTEK Lt. 10

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 79, Jakarta Selatan 12930

Telp. [021] 520 7797 Ext 4010, Fax. [021] 5202304

gardabumn@yahoo.com

MENARIK BUMN KE JALUR CEPAT



DAHLAN ISKAN adalah “bintang” dalam Kabinet Indonesia Bersatu II hasil *reshuffle*, yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Oktober 2011 silam. Perhatian publik tersedot pada pria kelahiran Magetan, Jawa Timur, 17 Agustus 1951 itu, yang bergaya menyempal dari menteri pada umumnya. Mulai dari cara berpakaian, berbicara, sampai cara kerjanya yang serba cepat dan kerap menerabas protokoler. Misalnya, secara mendadak naik ke gerbong kereta ekonomi tanpa pengawasan, tinggal di hotel yang dikelola BUMN di kamar paling jelek, dan banyak lagi.

Berlebihan? Mungkin saja. Tapi Dahlan Iskan adalah tipe pemimpin yang ingin menyaksikan secara langsung, fakta yang ada di lapangan. Tidak betah duduk di belakang meja, hanya menanti laporan. Kegiatan sidak, menjadi hal yang biasa. Namun, Dahlan tidak bermaksud merecoki para direksi BUMN, apalagi melakukan intervensi. Yang terjadi justru sebaliknya, ia

Kehadiran Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN, langsung mengukir nuansa birokrasi di perusahaan plat merah itu. Setiap BUMN dipacu untuk bergerak gesit sebagai korporasi, tanpa harus direpotkan lagi oleh prosedur berbelit dalam pengambilan keputusan. “Revolusi” pengelolaan BUMN, telah dimulai.

memberi keleluasaan dalam pengelolaan BUMN, dengan melansir kebijakan pendelegasian wewenang.

Tak tanggung-tanggung, ia melimpahkan 38 kewenangan kepada eselon I Kementerian BUMN, komisaris dan direksi BUMN. Rinciannya, 22 kewenangan kepada eselon I, 14 kewenangan kepada komisaris, dan dua kepada direksi.

Pengalihan kewenangan itu tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) BUMN Nomor 236 Tahun 2011, yang diteken dan mulai berlaku pada 15 November 2011. Dengan aturan baru ini, komisaris yang selama ini lebih berperan sebagai



PT PUSRI, salah satu BUMN yang akan menjadi andalan dalam sinergi BUMN untuk ketahanan pangan.

pengarah menjadi lebih diberdayakan. Mereka tak dapat lagi berlagak “ongkang-ongkang kaki mendapat gaji”. Ini terutama bagi komisaris di perusahaan BUMN yang tingkat kesehatannya dua tahun berturut-turut menanggung untung (AA).

Kewenangan komisaris selaku RUPS itu, antara lain, mengesahkan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP), menyetujui penyertaan modal bagi perusahaan lain, mendirikan anak perusahaan/perusahaan patungan dan melepaskan penyertaan modal pada anak usaha/patungan dengan nilai penyertaan sampai Rp 500 miliar. Selain itu, juga memberi persetujuan untuk mengadakan kerja sama dengan jangka waktu lima sampai 10 tahun. Bentuknya bisa kerja sama operasi, bangun-kelola-serahkan, menyewakan aset, maupun kontrak manajemen.

Adapun kewenangan direksi yang setara dengan RUPS adalah pembagian tugas dan wewenang anggota direksi dan persetujuan untuk mengadakan kerja sama dengan jangka waktu sampai lima 10 tahun. Bentuknya bisa kerja sama operasi, bangun-kelola-serahkan, menyewakan aset, maupun kontrak manajemen. Adapun untuk eselon I, kewenangan selaku RUPS lebih kepada perusahaan BUMN yang kategorinya belum sehat.

Kebijakan pendelegasian wewenang tersebut, tentu saja akan membuat direksi setiap BUMN

lebih leluasa bergerak. Dahlan Iskan memang menghendaki agar mereka aktif melakukan aksi korporasi, untuk memacu kinerja bisnisnya. Namun kebijakan ini bukan tanpa risiko. Sejumlah kalangan, mengkhawatirkan direksi dan komisaris BUMN lepas kendali. Dengan kontrol yang longgar, bisa saja mereka lebih leluasa untuk melakukan praktik penyimpangan. Misalnya, seenaknya menjual aset.

Konsen Dahlan Iskan untuk mendorong aksi korporasi, juga dicemaskan akan menjadikan BUMN sebagai perusahaan biasa, sehingga melupakan perannya dalam melayani masyarakat. Tentu saja Dahlan Iskan menepis kecemasan ini. Secara khusus, ia bahkan mengungkapkan rencana besarnya mengembangkan BUMN, untuk mendorong kemakmuran rakyat, yaitu BUMN di sektor pangan, properti, dan transportasi. “Saya punya rencana besar mewujudkan BUMN yang kuat dan mampu mengalahkan swasta,” ungkapnya. Menurut Dahlan, saat ini keinginan yang paling dekat di pikirannya adalah meraksakan BUMN Pangan demi menjaga ketahanan pangan dari kemungkinan terjadinya krisis pangan.

“Selama ini dalam kondisi normal kita masih mengimpor beras karena ketergantungan dari negara lain. Bagaimana jika Thailand, Vietnam, India, dan China tiba-tiba tidak bisa memenuhi permintaan beras dari Indonesia. Ini bisa membuat kita kesulitan pangan,” ujarnya.

Untuk itu mantan Direktur Utama PT PLN ini bertekad membangun BUMN Pangan dengan menyinergikan tiga BUMN (Sang Hyang Seri,

Pertani, dan Pusri) untuk mencetak 1 juta hektare lahan baru pertanian hingga 2014. "BUMN akan turun tangan dengan pendekatan korporasi untuk menyelesaikan berbagai kendala dalam pengembangan ketahanan pangan," ujarnya.

Pada bidang transportasi, akan dibangun industri kapal pengangkut komoditi seperti BBM, minyak sawit, dan batu bara. "Sinergi BUMN di sektor transportasi dapat dilakukan antara PT Bukit Asam, dan BUMN perkapalan lainnya. Selama ini BUMN terlalu banyak yang menyewa kapal hingga triliunan rupiah untuk mendistribusikan hasil komoditi," tegasnya.

Sudah saatnya dibuat industri kapal dengan skema jaminan pembiayaan. Dari sisi infrastruktur Dahlan melihat bahwa saat ini yang harus cepat-cepat dikembangkan adalah Pelabuhan Tanjung Priok. "Pelabuhan ini sangat strategis karena menjadi lalu lintas kapal dan barang dalam jumlah sangat besar. Selain juga mengembangkan Pelabuhan Minyak Sawit Kuala Tanjung," ujar Dahlan. Faktanya, saat ini infrastruktur logistik Indonesia belum memadai yang mengakibatkan terjadinya ekonomi biaya tinggi.

Sementara itu pada transportasi darat Dahlan berpikiran mengembangkan jalur transportasi kereta api dapat mengatasi kendala distribusi barang dan jasa yang selama ini terhambat

karena keterbatasan jalan. "Dalam dua tahun ke depan kita harus menyelesaikan pembangunan *"double track"* jalan kereta api Jakarta-Surabaya," tuturnya.

Dahlan juga menyoroti distribusi migas terutama dari Jawa Timur ke Jawa Barat serta di sejumlah wilayah lainnya di Indonesia. "Pembangunan LNG *receiving* terminal dan pipanisasi gas trans Jawa saya akan paksakan dapat diselesaikan dalam dua tahun. Selain menampung untuk kebutuhan gas dalam negeri, terminal ini juga bisa dimanfaatkan untuk keperluan ekspor," tegasnya.

Sementara itu pada sektor properti, Dahlan mengungkapkan bahwa saat ini banyak aset tidak produktif BUMN yang jika dikelola secara korporasi akan memberi keuntungan yang sangat besar bagi negara. "Potensi kelolaan aset non produktif BUMN yang bisa mencapai sekitar Rp500 triliun itu dapat digarap dan dikembangkan Perum Perumnas dan PT Kereta Api Indonesia," ujarnya.

Secara keseluruhan, jika rencana besar tersebut tidak direalisasikan sekarang juga maka Indonesia akan diserbu asing dan tidak bisa memanfaatkan pertumbuhan ekonomi. "Jika semua itu dilaksanakan sesuai jadwal, dan ditambah dengan masuknya Indonesia dalam investment grade pada semester I 2012 maka ke depannya bisa dibayangkan bahwa ekonomi Indonesia akan luar biasa bagus," katanya.

Apakah aksi tancap gas yang dilakukan Menteri Dahlan Iskan akan benar-benar memacu laju kinerja BUMN dalam kecepatan tinggi? Memang masih harus ditunggu. Yang jelas, gerak BUMN tidak hanya tergantung pada kekeluargaan direksi dan komisaris dalam mengelolanya, tetapi juga peran serta pada pekerja atau karyawan di setiap BUMN. **EB**



**Pelabuhan Minyak Sawit
Kuala Tanjung**

Bangkitkan Industri Strategis

DAHLAN ISKAN memang gencar mendorong BUMN untuk melakukan aksi korporasi, dan bergerak layaknya perusahaan murni. Namun, BUMN strategis yang sebagian berada dalam kondisi terengah-engah, ternyata mendapat perhatian yang besar juga.

BUMN yang bergerak di industri strategis dan manufaktur, banyak yang seperti terabaikan. Maklum, bisnis BUMN tersebut umumnya tidak menghasilkan keuntungan secara cepat, bahkan cenderung menyedot banyak modal. Padahal, kemampuan finansial pemerintah makin menipis. Maka, tidak aneh kalau banyak BUMN strategis dan manufaktur yang bahkan "mati suri".

Di era kepemimpinan Dahlan Iskan, Kementerian BUMN siap melakukan terobosan baru untuk menyehatkan atau membangkitkan kembali sejumlah BUMN strategis dan manufaktur. "Pak Dahlan telah memberi arahan, agar BUMN tersebut bisa menjadi industri terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara," ungkap Deputy Menteri BUMN Bidang Industri Strategis dan Manufaktur Irnanda Laksanawan.

Menurut Irnanda, BUMN strategis yang ada saat ini harus bangkit dengan cara bergabung menjadi kekuatan besar agar bisa bersaing dengan industri dari China dan India. Untuk itu, dalam tiga tahun terakhir ini pihaknya telah

melakukan revitalisasi terhadap sejumlah BUMN strategis di antaranya PT INKA, PT BBI, dan PT Barata.

Dalam revitalisasi ini, PT INKA masuk dalam pengembangan industri lokomotif. "Selama ini, lokomotif didesain oleh orang-orang Indonesia sejak republik ini berdiri," ujar Irnanda. Sedangkan PT BBI membuat alat-alat besar seperti kondensor untuk diekspor ke seluruh negara. Begitu juga halnya dengan PT Barata yang produknya juga disebar ke seluruh negara. "Sayangnya banyak insinyur yang berprinsip yang penting kerja, tapi tidak mau promosi," lanjutnya.

Dirut PT BBI Lala Indiono mengatakan sejak 2000-2008 perusahaannya sempat mengalami keterpurukan. Namun, kemudian bangkit lagi pada tahun 2009. "Kepercayaan dari pelanggan dan mitra bisnis dari Eropa masih tinggi. Bahkan, mereka sekarang sudah memesan kondensor," katanya. Hal sama juga sempat dialami PT Barata. Namun, hal itu tidak berlangsung

lama karena perusahaan mampu berkompetisi dengan perusahaan lain secara internasional.

"Sempat kami mendapat ancaman dari luar, seperti halnya produk China yang harganya murah. Tapi murah tidak bisa hanya dinilai rupiah saja, harus dinilai dampak dari apa yang dihasilkan," kata Dirut PT Barata Agus H. Purnomo.

Sementara itu, Dirut PT INKA Roos Diatmoko mengatakan saat ini kondisi PT INKA lebih baik jika dibandingkan pada tahun 2005 yang sepi order. Bahkan, pada tahun 2006 diancam likuidasi karena saat itu penjualannya di bawah Rp150 miliar. "Dan sekarang sudah di atas Rp788 miliar dan tahun depan ditargetkan Rp1 triliun," katanya.

Merespons masukan dari direksi BUMN tersebut, Irnanda memandang perlu adanya investasi baru mengingat beberapa pertimbangan. Salah satunya, banyak alat-alat industri yang sudah tua. Untuk itu, perlu kiranya pemerintah memberikan bantuan penanaman modal negara (PMN). "Itu akan membantu keputusan investasi," ujarnya. **EB**

Ketua Umum

: **Abdul Latif Algaff**
PT. Jamsostek (Persero)

Ketua

Bidang Organisasi Dan Keanggotaan

Ketua

Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)
dan Pendidikan Latihan (DIKLAT)

Ketua

Bidang Hukum dan Advokasi

Ketua

Bidang Hubungan Kelembagaan

Ketua

Bidang Usaha Pertambangan, Energi,
Industri Strategis dan Telekomunikasi

Ketua

Bidang Usaha Agro Industri, Kehutanan,
Kertas, Percetakan dan Penerbitan

Ketua

Bidang Logistik, Transportasi dan Pariwisata

Ketua

Bidang Usaha, Jasa Keuangan, Konstruksi
dan Jasa Lainnya

: **Lakoni Brama**
PT. Jamsostek (Persero)
: **Achmad Mochtarom**
PT. Taspen (Persero)

: **M. Asyhari**
PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)

: **Bisman Sinurat**
Perum Perumnas

: **Abdul Sadat**
PT. Aneka Tambang Tbk

: **Josem Ginting**
PT. Perkebunan Nusantara II (Persero)

: **Sri Nugroho**
PT. Kereta Api Indonesia (Persero)

: **Sandjoko**
Perum Pegadaian

Sekretaris Jenderal

: **M. Munif** - Perum Peruri

Sekretaris I

: **Eko Nugriyanto** - PT. Jamsostek (Persero)

Sekretaris II

: **Nasrizul** - PT. Petrokimia Gresik (Persero)

Sekretaris III

: **Fatah Yasin** - Perum Bulog

Sekretaris IV

: **Robert Tambunan** - PT. PPI (Persero)

Bendahara Umum

: **Hidayatullah Putra** - PT. Jamsostek (Persero)

Bendahara I

: **Ahmad Irfan** - PT. Garuda Indonesia (Persero)

Bendahara II

: **Chaedar** - PT. Perusahaan Gas Negara (Persero)

Bendahara III

: **Ariwibowo** - PT. Jasa Marga (Persero)

Bendahara IV

: **Setiowati** - PT. Jamsostek (Persero)

I. Organisasi dan Keanggotaan

Departemen Organisasi : 1. **Joni Nur Ashari** - Perum Bulog

2. **Engkus Kuswala** - PT. Bio Farma (Persero)

3. **Supriyono** - PT. Barata Indonesia (Persero)

Departemen Keanggotaan :

1. **Ade Bunyamin** - PT. Pindad (Persero)

2. **Ardi** - PT. Semen Baturaja (Persero)

3. **Iman S Achwan** - PT. Jamsostek (Persero)

II. SDM dan Diklat

Departemen SDM

: 1. **Agustono** - PT. ASDP (Persero)

2. **Ahmad Basuki** - PT. Len (Persero)

3. **Fonny Yuliana** - PT. Kimia Farma (Persero)

Departemen Diklat

: 1. **Dikdik Sodikin** - PT. Bio Farma (Persero)

2. **Ade Cahya** - PT. Pupuk Kujang (Persero)

3. **Tri Haryanto** - Perum Peruri

III. Hukum dan Advokasi

Departemen Hukum dan Hubungan Industrial :

1. **Abdul Haris S Mansyur** - PT. Jamsostek (Persero)

2. **Dayyan** - PT. Aneka Tambang (Persero)

3. **Kusnadi** - PT. Jasa Marga (Persero)

4. **Undianto** - PT. Kimia Farma (Persero)

Departemen Advokasi dan Perlindungan Anggota :

1. **Tommy Tampatty** - PT. Garuda Indonesia (Persero)

2. **M. Bakri Indrajaya** - PT. Dirgantara Indonesia (Persero)

3. **Achmad Iriansyah** - PT. Merpati Indonesia (Persero)

4. **Mutakin** - PT. Kertas Leces (Persero)

IV. Hubungan Kelembagaan

Departemen Hubungan Antar Lembaga :

1. **Maliki Sugito** - PT. Jamsostek (Persero)

2. **Ichwal Fauzi Harahap**

PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)

3. **Sukendar Mulya**

PT. Kereta Api Indonesia (Persero)

Departemen Hubungan Luar Negeri :

1. **Yuliana** - PT. Aneka Tambang, Tbk

2. **Moh. Fahrurizal Fan** - PT. Merpati Indonesia (Persero)

3. **Susetiorini Adiningsih** - PT. Sucofindo (Persero)

Departemen Informasi dan Komunikasi :

1. **Lutfiansyah** - Perum LKBN Antara

2. **Adityawarman** - PT. Hutama Karya (Persero)

3. **Asrial Aras** - Perum Perumnas

V. Bidang Usaha Pertambangan, Energi, Industri Strategis dan Telekomunikasi

Departemen Pertambangan dan Energi :

1. **Yulismi** - PT. Bukit Asam (Persero)

2. **Eko Sumardiyo**

PT. Pupuk Kalimantan Timur (Persero)

3. **Dian Kuncoro**

PT. Perusahaan Gas Negara (Persero)

4. **Bunsom Panjaitan** - Perum Peruri

Departemen Industri Strategis

dan Telekomunikasi

: 1. **Yuniarto Laksana** - PT. PAL (Persero)

2. **Widyoisworo** - PT. LEN (Persero)

3. **M. Tantowi** - PT. Boma Bisma Indra (Persero)

4. **Arif Rochmad** - PT. Pindad (Persero)

VI. Bidang Usaha Agro Industri, Kehutanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan

Departemen Agro Industri dan Kehutanan :

1. **Yana Nurahmad** - PT. Pupuk Kujang (Persero)

2. **Asril Naimy** - PT. Pupuk Iskandar Muda (Persero)

3. **Mirwan Stendel**

PT. Perkebunan Nusantara II (Persero)

Departemen Kertas, Percetakan dan Penerbitan :

1. **Imam Suliono** - PT. Kertas Leces (Persero)

2. **Sutisna** - Perum PNRI

3. **Rafita M** - PT. Balai Pustaka (Persero)

VII. Logistik, Transportasi dan Pariwisata

Departemen Logistik

: 1. **Lely Pelitasari** - Perum Bulog

2. **Sutarman** - Perum Perumnas

3. **Agus Pratiwindyo** - PT. Bhandha Ghara Rekha (Persero)

Departemen Transportasi dan Pariwisata :

1. **Era Restu Miftach** - PT. KBN (Persero)

2. **Adolf C. Enoch** - PT. Asdp (Persero)

3. **Sugiyarto** - Perum PPD

VIII. Bidang Usaha, Jasa Keuangan, Konstruksi dan Jasa Lainnya

Departemen Usaha dan Jasa Keuangan :

1. **Husodo** - Perum Pegadaian

2. **Renaildy Thamrin** - PT. Danareksa (Persero)

3. **Muhammad Thoha** - PT. Taspen (Persero)

Departemen Konstruksi dan Jasa Lainnya :

1. **Masril Ilyas** - Perum Perumnas

2. **Ign. Surjandjono** - PT. Nindya Karya (Persero)

3. **A. Yunus** - Perum Jasa Tirta I

4. **Hanafi** - PT. Batam (Persero)

SP LEBIH dari satu di sebuah BUMN, memang sah-sah saja. Namun, di PT ASDP Indonesia Ferry, adanya dua SP menorehkan sejarah kelam berupa perpecahan. Kini, kedua SP tersebut siap bersatu kembali, membangun satu kekuatan untuk memperjuangkan aspirasi karyawan plus kinerja perusahaan.

Rapat kerja (raker) Serikat Pekerja (SP) PT ASDP Indonesia Ferry pada 2010 lalu, merupakan momentum terbaik untuk membangun kembali hubungan industrial di BUMN yang mengoperasikan kapal penyebrangan ini.

"Hubungan dengan manajemen, sudah membaik, menyusul pergantian direksi," ungkap Agustono, Ketua SP ASDP.



▶ SP ASDP

RINDU KEMBALI BERSATU

Sebelumnya, hubungan SP dengan manajemen sangat buruk, karena petinggi direksi cenderung ingin mengendalikan SP. Karena pengurus SP berteguh dengan independensinya, direksi pun memfasilitasi berdirinya SP baru, semacam tandingan. Pengurus SP lama dan anggotanya yang loyal, bahkan banyak yang terpental kena mutasi dengan alasan tidak jelas.

Sekarang, iklim hubungan industrial di PT ASDP, sudah berangsur kondusif. Bahkan, dalam setiap acara besar yang digelar SP, selalu hadir jajaran direksi secara lengkap bahkan komisaris perusahaan. "Malah, komisaris utama sangat antusias pada keberadaan SP," ujar Agustono.

SP ASDP, di bawah kepepimpinan Agustono, memang bukan hanya menjadi wadah untuk memperjuangkan kepentingan karyawan, tetapi juga kemajuan perusahaan. Logikanya sederhana saja, jika kinerja perusahaan bagus, akan lebih mudah bagi SP untuk memperjuangkan aspirasi karyawan secara proporsional.

Dengan manajemen, SP ASDP mempunyai forum bernama Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit. Di dalamnya, terdapat wakil SP dan manajemen, masing-masing 6 orang. Dalam forum tersebut, manajemen dan SP ASDP bukan hanya mendiskusikan masalah-

masalah ketenagakerjaan, tetapi juga bagaimana memacu kinerja perusahaan dengan produktivitas karyawan.

Manajemen PT ASDP, sangat terbuka dengan berbagai masukan dari SP, untuk pengembangan bisnis perusahaan. Dibangunnya sejumlah jembatan penyebrangan, baik yang sudah seperti Suramadu maupun yang akan dibangun seperti penghubung Jawa-Sumatera, memang berpotensi menggerus bisnis PT ASDP. "Ini termasuk masalah yang juga kita pikirkan jalan keluarnya. Kita aktif memberi masukan pada manajemen," ucap Agustono, "Kami sadar, masa depan perusahaan, adalah masa depan kami juga, sebagai pekerja."

Setelah berhasil membangun kembali hubungan yang kondusif dengan manajemen, kemudian muncul wacana untuk menggabungkan kembali dua SP di PT ASDP. "Kita sudah melakukan peninjauan. Bahkan manajemen ikut memfasilitasi," ujar Agustono.

Agustono, yang sudah berkarir di PT ASDP selama 28 tahun, sudah terlibat aktif dalam SP ASDP, bahkan sejak pembentukannya. Alumni Magister Management Universitas Indonesia (MM UI) itu, termasuk pendiri SP ASDP, yang terbentuk pada Tahun 2000. Sebelum terpilih sebagai Ketua Umum sekarang ini, ia sudah menduduki jabatan berbagai di bidang SP. Di PT ASDP sendiri, Agustono masih menjabat sebagai Direktur Utama Dana Pensiun. **EB**

AGUSTONO
Ketua SP ASDP

SUDAH sekian lama, hubungan industrial di PT Perusahaan Gas Negara (PGN) berlangsung “panas-dingin”. Kendati Serikat Pekerja (SP) PGN berhasil memperjuangkan sejumlah kepentingan karyawan, namun hubungannya dengan manajemen, masih menyisakan jarak. Karena itu, di lingkungan perusahaan yang antara lain bergerak dalam distribusi gas ini, tidak pernah ada Perjanjian Kerja Bersama (PKB), yang sejatinya merupakan mahkota hubungan industrial.

Keadaan itu, kini telah berubah, menyusul terpilihnya kepengurusan baru SP PGN yang dipimpin Chaedar, pada awal 2011 lalu. Di lingkungan SP PGN, Chaedar sebetulnya bukan orang baru. Sebelumnya, ia memimpin SP PGN Cabang Medan. Karena itu, ia bisa dengan cepat beradaptasi, dan —bersama pengurus lainnya— menyusun program kerja yang betul-betul memenuhi aspirasi karyawan PT PGN, khususnya yang menjadi anggota SP.

Langkah penting yang dilakukan adalah membangun hubungan baik dengan manajemen. “Jika hubungan baik telah terbangun, niscaya akan relatif lebih mudah bagi SP, untuk menyampaikan aspirasinya,” ujar Chaedar.

Benar saja, setelah hubungan dengan manajemen terjalin baik, SP PGN bisa mewujudkan sejumlah keputusan strategis, yang selama ini menjadi aspirasi karyawan. “Yang paling utama, tentu saja disahkannya PKB,” ungkap Chaedar, bersemangat, “Dan ini menjadi PKB yang pertama ada di PT PGN.”

► SP PGN

Nuansa Baru Hubungan Industrial

HUBUNGAN industrial di lingkungan PT PGN, mengalami perubahan cukup signifikan, menyusul terpilihnya kepengurusan baru. Perubahan itu ditandai dengan terbitnya PKB untuk pertama kali.

Kehadiran PKB tersebut, menjadi semacam “karpet merah” bagi SP PGN, untuk mewujudkan sejumlah aspirasi karyawan, yang sebelumnya tidak dipenuhi perusahaan.

Misalnya, pemberian hak tertentu untuk karyawan yang bekerja di remote area, di daerah terpencil. SP PGN juga berhasil memperjuangkan soal Masa Persiapan Pensiun (MPP) karyawan, dan system pemberian bonus yang lebih adil.

Secara simultan, SP PGN juga aktif membenahi internal organisasi. Mulai dari administrasi keanggotaan, sampai pembuatan alur penyampaian aspirasi anggota yang efektif. “Kita ingin, aspirasi yang akan kita perjuangkan nanti, benar-benar datang dari anggota, termasuk yang berada di level paling bawah,” ujar Chaedar.

Sekarang ini, menurut Chaedar, sudah 85 persen karyawan PT PGN menjadi anggota

SP. Setelah melihat berbagai langkah positif yang diayunkan SP, banyak karyawan PT PGN yang tidak lagi “alergi” pada SP. **EB**



■ **CHAEDAR**
Ketua SP PGN

KINERJA

❖ PT Bukit Asam

Siap Melompat Lebih

DENGAN mengeksplorasi cadangan batu bara terbesar di dunia, PT Bukit Asam siap melejit menjadi perusahaan tambang terintegrasi terbesar di Indonesia. Sejumlah langkah strategis, siap diayunkan untuk mewujudkan target besar tersebut.



PT BUKIT ASAM sedang ancap-ancang untuk melakukan lompatan tinggi. Targetnya adalah eksplorasi Tanjung Enim, salah satu lokasi dengan cadangan batu bara terbesar di Indonesia. Di dalamnya terkandung miliaran ton. Namun, kawasan seluas 66 ribu hektar di Kabupaten Muara Enim dan kabupaten Lahat ini berada nun jauh di pelosok Sumatra Selatan. Sarana dan prasarana untuk

mengangkut sumber energi itu sangat minim.

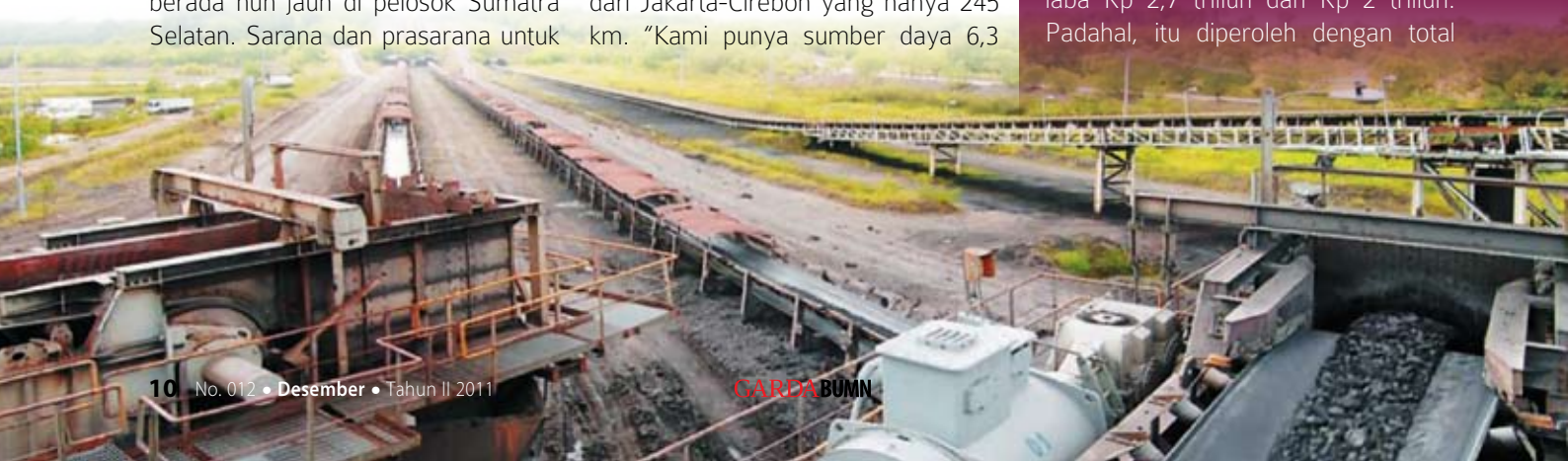
Apalagi, jaraknya dari pelabuhan, titik sentral pengangkutan batu bara, sangat jauh. Bayangkan, dari pelabuhan Lampung jarak yang harus ditempuh sekitar 417 km. Sedangkan dari pelabuhan Tanjung Api-Api, Sumatra Selatan, sekitar 270 km. Lebih jauh dari Jakarta-Cirebon yang hanya 245 km. "Kami punya sumber daya 6,3

miliar ton batu bara, namun hanya ada di dalam bumi. Itu berharga kalau ditambang. Kalau tidak, *nggak* ada artinya," ujar Milawarma, Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk.

Bagi pemain tambang batu bara, mempunyai cadangan miliaran ton jelas merupakan aset yang sangat berharga. Apalagi di tengah permintaan sumber energi di dunia yang terus meningkat. Di pasar domestik saja, permintaan sudah mencapai 70 juta ton per tahun dan diperkirakan naik menjadi 220 juta ton pada 2020. Belum lagi dari sisi harganya di pasar internasional yang semakin mahal.

Milawarma mengaku tergiur dengan tingginya permintaan dan harga batu bara di pasar domestik dan internasional. Terlebih lagi, Bukit Asam merasakan gurihnya pendapatan dari penjualan batu bara. Bayangkan, Bukit Asam yang sebelumnya tidak pernah membayangkan meraih laba Rp 1 triliun, tiba-tiba menerima keuntungan Rp 1,7 triliun pada 2008 akibat lonjakan harga batu bara di pasar internasional.

Bahkan, pada 2009 dan 2010, perusahaan masing-masing menggaet laba Rp 2,7 triliun dan Rp 2 triliun. Padahal, itu diperoleh dengan total



Sejarah PT Bukit Asam

SEJARAH pertambangan batubara di Tanjung Enim dimulai sejak zaman kolonial Belanda tahun 1919, dengan menggunakan metode penambangan terbuka (*open pit mining*) di wilayah operasi pertama, yaitu di Tambang Air Laya. Selanjutnya mulai 1923 beroperasi dengan metode penambangan bawah tanah (*underground mining*) hingga 1940, sedangkan produksi untuk kepentingan komersial dimulai pada 1938.

Seiring dengan berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda di tanah air, para karyawan Indonesia kemudian berjuang menuntut perubahan status tambang menjadi pertambangan nasional. Pada 1950, Pemerintah RI kemudian mengesahkan pembentukan Perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam (PN TABA).

Pada 1981, PNTABA kemudian berubah status menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. Dalam rangka meningkatkan pengembangan industri batubara di Indonesia, pada 1990 Pemerintah menetapkan penggabungan Perum Tambang Batubara dengan Perseroan.

Sesuai dengan program pengembangan ketahanan energi nasional, pada 1993 Pemerintah menugaskan Bukit Asam untuk mengembangkan usaha briket batubara.

Pada 23 Desember 2002, Bukit Asam mencatatkan diri sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia. **EB**

Tinggi

kapasitas produksi sekitar 10-12 juta ton per tahun. Sedangkan, melalui visi PTBA Emas, perusahaan negara ini menargetkan kapasitas produksi batu bara hingga 50 juta ton per tahun pada 2015. "Kami yakin bisa menjadi salah satu produsen batu bara terbesar di Indonesia."

Kawasan yang akan menjadi basis utama produksi adalah Tanjung Enim. Ini adalah tambang tertua yang dimiliki Bukit Asam karena sudah dimulai sejak zaman kolonial Belanda pada 1919. Saat itu pengambilan batu bara dikerjakan dengan metode penambangan terbuka (*open pit mining*) di wilayah operasi pertama, yaitu di Tambang Air Laya. Selanjutnya mulai 1923 beroperasi dengan metode penambangan bawah tanah (*underground mining*) hingga 1940. Produksi komersial dimulai pada 1938.

Berbekal sumber daya mineral dari kawasan Tanjung Enim dan Ombilin, serta areal pengembangan lainnya, Bukit Asam menyiapkan beberapa rencana terobosan strategis untuk mencapai visi PTBA Emas, kerja sama dengan investor kakap dari mancanegara dijalin perusahaan negara ini untuk mewujudkan impiannya.

Terobosan pertama adalah menggenjot produksi dan penjualan batu bara melalui peningkatan daya angkut jaringan transportasi yang sudah ada dan peningkatan kapasitas pelabuhan. Untuk meningkatkan daya angkut tersebut, Bukit Asam telah menjalin kerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) melalui penandatanganan kontrak angkutan jangka panjang dengan



daya angkut 20 juta ton per tahun ke Tarahan (Lampung) dan 2,7 juta ton ke pelabuhan Kertapati di Palembang.

Terobosan kedua, membangun jalur kereta api baru dan pelabuhan khusus batu bara di Lampung. Jalur baru sepanjang 307 km ini akan menghubungkan Tanjung Enim-Lampung, dengan perkiraan daya angkut sebesar 25 juta ton per tahun. Proyek senilai US\$ 4,8 miliar akan digarap oleh konsorsium Bukit Asam bersama *Trans-pacific Railway* dan *Chine Railway Eng Corp.* dengan target operasi komersial

pada 2014.

Langkah ketiga, perseroan merintis kerja sama pengembangan angkutan kereta api batu bara dengan Adani Group, taipan asal India yang menduduki peringkat 81 miliarder dunia versi *Forbes*. Angkutan ini menempuh jalur dari lokasi Tanjung Enim ke pelabuhan Tanjung Api-api (Sumatera Selatan), berjarak kurang lebih 270 km dengan kapasitas angkut 35 juta ton per tahun. Nilai proyek sekitar US\$ 1,8 miliar.

Akuisisi tambang-tambang baru juga menjadi salah satu strategi utama Bukit Asam untuk mendongkrak produksi. Targetnya, perusahaan batu bara di luar areal tambang milik Bukit Asam di Tanjung Enim dan Ombilin. Salah satu akuisisi yang berhasil dilakukan adalah pembelian 51 persen saham PT International Prima Coal yang beroperasi di Kalimantan Timur dengan nilai transaksi US\$ 17,9 juta.

Dengan sejumlah skenario tersebut, Bukit Asam bukan hanya optimis bisa memproduksi batu bara sebanyak 50 juta ton per tahun, melainkan jauh lebih besar dari itu, yakni 82 juta ton per tahun. **EB**



REGULASI

Memangkas Belitan

SEPERTI ayunan pedang tajam, SK Menneg BUMN 236 dengan telak memangkas belitan birokrasi, yang selama ini dianggap menghambat keleluasaan BUMN untuk bergerak sebagai korporasi. Tapi, kebijakan Menteri Dahlan Iskan ini, bukan tanpa risiko.

SEBAGAI mantan Direktur Utama (Dirut) PT PLN, Dahlan Iskan boleh jadi merasakan betul belitan birokrasi yang membuat BUMN sulit bergerak. Karena itu, tidak lama setelah menjabat Menteri BUMN, mantan jurnalis itu melansir kebijakan yang revolusioner, melalui Surat Keputusan Menneg BUMN Nomor: KEP-236/MBU/2011 tentang "Pendelegasian Sebagian Kewenangan dan/atau Pemberian Kuasa Menteri Negara BUMN sebagai Wakil Pemerintah Selaku Pemegang Saham/RUPS pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas serta Pemilik Modal pada Perusahaan Umum kepada Direksi, Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas dan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian BUMN".

Kebijakan yang dilansir pada 15 November 2011 itu, ibarat pedang tajam yang memangkas alur birokrasi pengelolaan BUMN. Terdapat 22 jenis kewenangan Menneg BUMN yang didelegasikan ke pejabat Eselon I Kementerian BUMN (Sekretaris Kementerian BUMN, Deputi Teknis dan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis). Sedang 14 kewenangan Menteri Negara BUMN didelegasikan/dikuasakan ke Dekom/Dewas. Dua jenis kewenangan didelegasikan ke

direksi BUMN.

Dengan pendelegasian tersebut, maka Kementerian BUMN sebagai pemegang saham akan lebih fokus pada hal-hal yang lebih strategis, seperti revitalisasi BUMN yang kinerjanya sangat buruk, pembenahan aset-aset BUMN yang tidak produktif dan 'idle'.

Menneg BUMN, misalnya, tidak lagi sepenuhnya menjadi pengendali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selama ini, RUPS dianggap dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar atau menentukan pembatasan lain kepada direksi selain yang diatur dalam anggaran dasar ini.

Sekarang, Menneg BUMN selaku pengendali RUPS dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya ke Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian BUMN, Dekom/ Dewas dan Direksi. Itulah sebabnya Kepmen 236 itu dapat langsung diterapkan. Dalam Kepmen 236, Pejabat Eselon I KBUMN langsung dapat mewakili Menteri dan bertindak selaku RUPS atau mengambil keputusan di luar RUPS yang punya kekuatan sama dengan RUPS terkait hal-hal yang didelegasikan. Kepmen 236 juga memberi kewenangan ke Pejabat Eselon

Birokrasi BUMN



I untuk memberikan kuasa/substitusi pada pejabat Eselon I lainnya atau pejabat Eselon II di lingkungan KBUMN.

Selain memberi kewenangan, Menteri Negara BUMN dalam juga mewajibkan Pejabat Eselon I, Dekom/Dewas dan Direksi yang menerima pendelegasian tersebut untuk menyampaikan laporan berkala kepada Menteri setiap bulan Juli tahun berjalan dan bulan Januari tahun berikutnya, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Maka, dengan Kepmen 236 ini, Dekom/Dewas dapat langsung mengambil keputusan tanpa meminta persetujuan RUPS/Menteri. Begitu juga Direksi, dapat langsung mengambil keputusan tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari Dekom/Dewas dan atau RUPS/Menteri.

Meskipun disebut “tidak sangat strategis”, ternyata hal-hal yang didelegasikan tersebut merupakan hal-hal penting dalam korporasi. Seperti kewenangan Deputi Teknis untuk mengesahkan RKAP BUMN yang tingkat kesehatannya 2 tahun berturut-turut tidak mencapai kategori Sehat AA. Sedangkan bagi BUMN yang tingkat kesehatannya 2 tahun berturut-turut dikategorikan sehat (minimal AA), pengesahannya didelegasikan ke Dekom/Dewas. Bukannya tanpa soal, kategorisasi Sehat AA tersebut hanya dikenal di KEP-100/2002 yang digunakan

untuk BUMN Non Keuangan. Sedang BUMN Keuangan masih merujuk pada Kepmenkeu 826.

Kepmen 236 tersebut juga menyiratkan perlunya koordinasi lebih erat antara unit Eselon I. Misalnya, dalam pelaksanaan tindak lanjut penambahan dan pengurangan PMN yang telah ditetapkan PP-nya, diperlukan penetapan bersama antara Sesmen dan Deputi Teknis.

Contoh lainnya, dalam pengesahan RKAPKBL BUMN yang 2 tahun berturut-turut tidak mencapai kategori Sehat AA, meskipun didelegasikan ke Deputi Teknis, tetap harus berkoordinasi dengan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis.

Kepmen 236 ini mungkin masih menghadapi “masa transisi” dalam implementasinya. Untuk itu sosialisasi dan koordinasi menjadi penting sehingga keputusan ini bisa lebih efektif. **EB**

REGULASI

Dari Menneg BUMN pada Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN

1. Pengesahan RKAP BUMN yang tingkat kesehatannya 2 tahun berturut-turut dikategorikan sehat.
2. Pengesahan RKA PKBL BUMN yang tingkat kesehatannya 2 tahun berturut-turut sehat (minimal AA) dan perubahannya.
3. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perum.
4. Persetujuan pengalihan atau menjadikan jaminan utang aktiva tetap Persero/Perum yang nilainya sampai Rp 500 milyar dalam 1 transaksi atau lebih dalam 1 tahun, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. (Ketentuan ini berlaku sepanjang nilai Rp 500 milyar tersebut tidak melebihi 50% dari kekayaan bersih BUMN dan sepanjang ekuitas perusahaan tidak negatif (karena menjadi kewenangan RUPS/ Menteri BUMN) yang didelegasikan kepada Deputi Teknis.
5. Persetujuan penghapusan bukaan aktiva tetap karena kondisi tertentu (hilang, musnah, total lost, biaya pemindahtanganannya lebih besar daripada nilai ekonomis yang diperoleh dari pemindahtanganan tersebut, dibongkar, tidak lagi menjadi milik atau dikuasai oleh perusahaan berdasarkan peraturan perundangan dan atau pengadilan yang berkekuatan hukum tetap).
6. Persetujuan untuk melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain, mendirikan anak perusahaan/perusahaan patungan, dan melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan/perusahaan patungan, dengan nilai penyertaan sampai Rp 500 milyar.
7. Persetujuan untuk mengikat perusahaan sebagai penjamin (borg atau avalis).
8. Persetujuan untuk melakukan kerjasama dengan jangka waktu 5 tahun sampai dengan 10 tahun (berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, kerja sama operasi (KSO), Bangun Kelola Serahkan (BOT), Bangun Milik Serah (BowT), Bangun Serah Guna (BTO).
9. Persetujuan untuk menetapkan *blue print* orga-

nisasi perusahaan.

10. Persetujuan untuk menetapkan dan mengubah logo perusahaan.
11. Persetujuan untuk melakukan tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP, bagi BUMN yang RKAP-nya disetujui oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
12. Persetujuan untuk membentuk yayasan, organisasi dan atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan yang dapat berdampak bagi perusahaan.
13. Persetujuan untuk pembebanan biaya perusahaan yang bersifat tetap dan rutin untuk kegiatan yayasan, organisasi dan atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan.
14. Persetujuan untuk pengusulan wakil perusahaan untuk menjadi calon anggota direksi dan dewan komisaris/dewan pengawas pada perusahaan patungan dan atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada perusahaan dan atau bernilai strategis.

Dari Menneg BUMN pada Direksi BUMN

1. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Persero (Pendelegasian ini hanya berlaku untuk Persero, Kewenangan ini dapat dilaksanakan oleh Direksi apabila RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan kewenangan anggota Direksi, Dalam melaksanakan kewenangan ini, Direksi berkonsultasi dengan Dewan Komisaris).
2. Persetujuan untuk melakukan kerjasama dengan jangka waktu sampai 5 tahun (berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, kerja sama operasi (KSO), Bangun Kelola Serahkan (BOT), Bangun Milik Serah (BowT), Bangun Serah Guna (BTO). **EB**

ADA DUA MACAM manusia di dunia ini: mereka yang mencari alasan dan mereka yang mencari keberhasilan.

Orang yang mencari alasan selalu mencari alasan mengapa pekerjaannya tidak selesai, dan orang yang mencari keberhasilan selalu mencari alasan mengapa pekerjaannya dapat terselesaikan (Alan Cohen).

AWAS, VIRUS “ALASAN.EXE”

kita, maka ia akan bekerja secara otomatis, begitu kita menghadapi tantangan. Maka, rencana-rencana penting yang sudah disusun rapi pun, bisa gagal dijalankan, hanya karena masalah sepele. Hujan rintik-rintik saja, cukup untuk menyetop langkah kita pergi ke tempat pertemuan. Virus alasan, akan menebalkan rasa malas, melumpuhkan mental bersaing, dan membunuh keberanian menghadapi tantangan. Virus ini, akan membuat kita gagal, sebelum kegagalan sesungguhnya terjadi. Dan kegagalan seperti ini, sedikpun pun tidak bisa dijadikan pelajaran.

Karena itu, jika sampai sekarang kita belum juga mendarat di pencapaian yang tinggi dalam hidup, periksalah pikiran kita; apakah sudah terinfeksi oleh “virus alasan”? Segeralah bersihkan pikiran kita dari virus jahat dan menghambat itu, dengan tekad yang kuat. Jika mungkin, tontonlah film “Yes Man”, yang bernuansa komedi tapi sangat inspiratif.

Film yang dibintangi komedian Jim Carrey itu, mengisahkan seorang lelaki pemalas bernama Carl Allen. Hidupnya sangat monoton dan terlalu banyak pertimbangan. Mau melakukan sesuatu saja harus berpikir seribu kali hingga akhirnya tak melakukan apa-apa. Praktis hidupnya stagnan. Hanya menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tak berguna. Di rumah, nonton TV, dan kegiatan-kegiatan lain yang sama sekali tak produktif. Dia selalu mengatakan “tidak” ketika diajak untuk melakukan sesuatu yang baru, tentu saja dengan mengumbar banyak alasan.

Suatu ketika, ia mengikuti program pengembangan kualitas diri. Bukan karena ingin mengubah diri, tapi karena sedikit penasaran saja. Dalam program itu, semua yang hadir diwajibkan untuk mengucapkan kata “yes” pada tantangan apapun, yang tentu saja direspon dengan malas oleh si Carl. Melihat gelagat itu, sang instruktur mendekat, dan memaksa agar Carl mengganti “no” yang biasa diucapkannya, menjadi “yes”.

Karena dipaksa dengan sangat keras, Carl pun terpengaruh. “Yes...yes..yes..,” teriaknya, bersemangat. Semangat untuk mengatakan “yes”, rupanya masuk ke dalam pikiran Carl, sehingga ia mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sejak itu, ia berupa menjadi lelaki yang bersemangat, riang, dan menghadapi tantangan apapun dengan suka cita. **EB**

JIKA ANDA terbiasa bekerja atau bermain dengan komputer, tentu akan merasa jengkel kalau komputer Anda kena virus. Terlebih jenis virus yang punya extension “.exe”, yang bisa berkembang biak hingga merusak data sampai melumpuhkan komputer Anda. Dalam hidup kita, juga ada sejenis “virus” yang sangat berbahaya, dan bisa menggagalkan kita mencapai tujuan hidup. Namanya, “alasan”. Untuk menekankan tingkat bahayanya, bolehlah diibaratkan “.exe”, seperti pada virus komputer.

Virus alasan, bisa menyusup ke dalam pikiran, tanpa kita sadari. Ketika disuruh datang lebih pagi ke kantor karena ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan, kita tidak menepatinya dengan alasan macet. Ketika diminta kerja lembur, kita sudah memikirkan sederet alasan yang bisa dipilih, untuk menghindar, bukan memikirkan bagaimana bekerja lebih efisien sehingga jam lembur bisa dipersingkat namun pekerjaan tetap selesai dengan kualitas baik.

Jika “virus alasan” sudah terinstal dalam pikiran



DINAMIKA



Bank BNI Sabet BUMN Terbaik 2011.

Ini Dia, **BUMN Terbaik**

Sebuah tim juri yang dipimpin mantan Sekretaris Menteri BUMN Said Didu, kembali melansir hasil penilaiannya terhadap sejumlah BUMN. Tim juri yang juga diisi oleh mantan Menteri BUMN Tanri Abeng, bersifat independen, sehingga penetapan BUMN sepanjang 2011, bisa dipertanggung jawabkan. Kali ini, ada 69 BUMN yang mengembalikan kuesioner. Dari jumlah tersebut, terpilih 53 BUMN yang melakukan persentasi di depan dewan juri. Penilaian pun terdiri dari empat tahap. Dimulai dari pengisian kuesioner hingga diadakannya sidang dewan juri. Inilah BUMN yang berhasil menyabet gelar terbaik 2011.

Kategori Inovasi Manajemen BUMN Terbaik

1. PT Pertamina (Persero)
2. PT BNI (Persero) Tbk
3. PT Bukit Asam (Persero) Tbk

Kategori Inovasi GCG BUMN Terbaik

1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
2. PT Jasa Marga (Persero) Tbk
3. PT Pertamina (Persero)

Kategori Inovasi Produk Manufaktur BUMN Terbaik

1. PT PINDAD (Persero)
2. PT Biofarma (Persero)
3. PT INTI (Persero)

Kategori Inovasi Produk Agrikultur BUMN Terbaik

1. PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)

2. PT Sang Hyang Seri (Persero)
3. Perum Perhutani (Persero)

Kategori Inovasi Produk Jasa BUMN Terbaik

1. PT PLN (Persero)
2. PT POS Indonesia (Persero)
3. Perum Pegadaian (Persero)

Kategori Inovasi Teknologi BUMN Terbaik

1. PT Biofarma (Persero)
2. PT BNI (Persero)
3. PT PP (Persero) Tbk

Kategori Inovasi Pemasaran BUMN Terbaik

1. PT BNI (Persero) Tbk
2. PT Telkom (Persero) Tbk
3. Perum Pegadaian

Kategori Inovasi SDM BUMN Terbaik

1. PT Pupuk Kaltim
2. PT Telkom (Persero) Tbk
3. PT Aneka Tambang (Persero) Tbk

Kategori Inovasi PKBL BUMN Terbaik

1. PT BNI (Persero) Tbk
2. PT Telkom (Persero) Tbk
3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Kategori Inovasi Pelayanan Publik BUMN Terbaik

1. PT PLN (Persero)
2. PT KAI (Persero)
3. PT Pupuk Kaltim

Kategori Inovasi Strategi Bisnis Global BUMN Terbaik

1. PT Biofarma (Persero)
2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
3. PT Pertamina (Persero)

Dari semua kategori ini, BUMN yang terpilih menjadi *best of the best* adalah PT BNI (Persero) Tbk. Direktur Utama BNI Gatot M Suwondo menerima langsung penghargaan ini. Sementara itu, RJ Lino dari PT Pelindo II (Persero) Tbk terpilih menjadi CEO BUMN inovatif terbaik. **EB**



SP Antara Perjuangan Bantu Anggota Dapatkan Rumah

SP ANTARA PERJUANGAN melakukan langkah terobosan, dengan upaya memenuhi kebutuhan anggotanya secara langsung, untuk mempunyai rumah.

Ada yang berbeda dengan program kerja Serikat Pekerja (SP) Antara Perjuangan. Tidak seperti SP BUMN pada umumnya, yang hanya konsen pada upaya memperjuangkan hak-hak pekerja dan menciptakan iklim hubungan industrial yang

kondusif, SP BUMN yang mengelola kantor berita ini, melakukan terobosan baru, dengan program yang langsung memenuhi kebutuhan karyawan terhadap rumah.

Melalui kerja sama dengan Bank DKI sebagai penyedia kredit, SP Antara Perjuangan memberikan kemudahan pada karyawan LKBN Antara, untuk memiliki rumah dengan fasilitas kredit lunak. "Tahap pertama, sudah direalisasikan kredit untuk 25

karyawan, dengan total Rp 650 juta," ungkap Lutfiansyah Noor.

Di samping dengan Bank DKI, SP Antara Perjuangan juga menggandeng Koperasi Bina Usaha Griya Nusantara sebagai pengembang. Lokasi perumahan cukup strategis, di daerah Sawangan Depok, Jawa Barat. Komplek perumahan di bangun di atas lahan 4,5 hektar. Dengan harga rumah sekitar Rp 90 juta, Karyawan LKBN Antara hanya menyicil Rp 925 ribu per bulan. Tidak ada biaya tambahan lainnya.

Namun, seperti dikatakan Lutfiansyah, program perumahan itu tidak mengaburkan program inti SP Antara Perjuangan, yaitu memperjuangkan aspirasi pekerja LKBN Antara. "Misalnya, kami tetap konsen pada perumusan PKB yang menjadi roh perjuangan SP," tegasnya. **EB**

Undangan

Workshop Hubungan Industrial



CONTACT PERSON

Imam S Achwan : 085 888 555 509

Rudy Firmana : 0817 666 1966, 0813 1024 1718
021-94521555

KEYNOTE SPEAKER:

Drs. A. Muhaimin Iskandar, MSI

(Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI)

NARA SUMBER:

Prof. DR. Payaman Simanjuntak

Instruktur dari ILO - Jakarta

Basani Situmorang, SH

Iskandar Dwidjoyatono, SH

(Mantan Direktur Hubungan Industrial dan Direktur Pemberdayaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kemenakertrans)

Dr. Sony Suharso

Angger P Yuwono (Sekretaris Jenderal Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI))

H. Hotbonar Sinaga (Direktur Utama PT Jamsostek (Persero))

Herman Hidayat (Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN RI)

Abdul Latif Algaff (Ketua Umum FSP BUMN)



Diselenggarakan Oleh:

**BADAN PENGURUS FEDERASI SERIKAT PEKERJA
BADAN USAHA MILIK NEGARA BPF SP BUMN)**



**9 - 11
Februari 2012
Hotel Santika
Jl. Sumatera
No. 52-54
Bandung**

Target Setelah Selamat dari Maut

KETUKAN PALU Makamah Agung (MA) pada 22 Maret 2011 itu, bagi karyawan PT Istaka Karya, terdengar bagaikan gemuruh tsunami yang menghancurkan. Hari itu, MA menguatkan keputusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yang menjatuhkan vonis pailit pada BUMN yang bergerak di bidang jasa konstruksi ini.

Kementerian BUMN, juga cenderung pasrah. "Kita menerima keputusan pailit," ujar Mustafa Abubakar, yang saat itu masih menjabat Menteri BUMN. Kementerian BUMN juga sudah menunjuk BUMN lain, yaitu PT Waskita Karya, untuk membantu merampungkan kepailitan Istaka Karya, dengan mengambil alih tugas dan tanggung jawabnya, sesuai dengan kesepakatan.

Pailitnya Istaka Karya, bermula dari utang yang berbentuk *Commercial Paper* (CP) kepada PT JAIC sekira USD7,645 juta. CP tersebut adalah utang atas tunjuk, bukan utang atas nama. Untuk CP yang diterbitkan pada Desember 1998, yang jatuh temponya 1 Januari 1999 merupakan CP tangan keempat.

Selanjutnya, PT JAIC mengajukan permohonan pailit terhadap PT Istaka Karya karena perusahaan pelat merah ini dianggap tidak melaksanakan putusan MA yang memerintahkan perusahaan itu membayar kewajibannya sebesar USD7,645 juta. Akhirnya, pada 22 Maret 2011 lalu, MA mengabulkan

PT Istaka Karya sepertinya akan gulung tikar, ketika MA mengetukkan palu yang menyatakan kepailitan. Namun, melalui proses yang berliku, akhirnya keputusan yang menyesakkan itu bisa dibatalkan. Kini, Istaka Karya malah berani memasang target merengkuh laba.



kasasi yang dilayangkan PT JAIC Indonesia tersebut dalam perkara permohonan pailit.

Proses pemailitan PT Istaka Karya berlangsung alot, bahkan sempat dihiasi drama demonstrasi oleh sekitar 300 orang mengatasnamakan Forum Kreditur Konkuren Istaka Karya (FKKI), di depan kantor Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mereka menuntut pemerintah agar bertanggung jawab atas hutang PT Istaka Karya terhadap kepada para kreditor yang jumlahnya mencapai Rp1,2 triliun. "Banyak di antara rekan-

rekan kreditor yang sudah lama tidak kunjung diselesaikan pembayarannya. Ada yang sudah tiga tahun, bahkan lima tahun," ujar Ketua FKKI Candra Atang, saat aksi.

Seluruh karyawan PT Istaka Karya, tentu saja sangat resah dengan kepailitan perusahaan tempatnya bekerja. Meskipun saat itu Kementerian BUMN menjamin akan menyelamatkan mereka, dengan dengan cara memindahkan para karyawan tersebut ke BUMN lainnya. Namun, tetap saja, jaminan tersebut tidak sepenuhnya bisa

mengusir keresahan mereka.

Bahkan, pada kreditur yang awalnya ngotot mempailitkan Istaka Karya, belakangan menunjukkan gelagat sebaliknya.

Karena itulah, jalan menuju perdamaian terbuka kembali. Setelah melalui beberapa kali pembicaraan untuk mencari langkah perdamaian terbaik, akhirnya kepailitan Istaka Karya pun dibatalkan. Salah satu kesepakatan penting yang dicapai, utang perseroan dikonversi menjadi saham dan sebagian lagi dibayarkan.

"Salah satu mekanisme perdamaannya adalah PT Waskita Karya (Persero) akan menyuntikkan dana ke kita sekira Rp70 miliar hingga Rp80 miliar. Dengan penyuntikan dana tersebut maka Waskita akan mendapat 51 persen saham Istaka," ungkap Direktur Utama Istaka Kasman Muhammad.

Perdamaian tersebut terjadi

pada 9 Desember 2011. Nantinya dana hasil suntikan dari Waskita Karya tersebut akan dibayarkan Istaka Karya kepada para kreditur. Sementara sisa saham Istaka Karya sebesar 49 persen akan dimiliki oleh kredit konkuren.

Lalu dari total utang Istaka Karya kepada kredit konkuren senilai Rp385,58 miliar, Waskita Karya mempunyai piutang sebesar Rp90 miliar di dalamnya. "Jadi nanti kalau di piutang Waskita Karya yang Rp90 miliar itu dikonversi menjadi saham, maka Waskita Karya akan memiliki 66 persen saham Istaka karya," paparnya. Proses perdamaian tersebut ditargetkan n beres pada awal 2012 ini.

Kesempatan Kedua

PT Istaka Karya sudah dalam kondisi sudah berlari, setelah selamat dari ancaman maut. BUMN ini akan

memanfaatkan kesempatan kedua yang diperolehnya, bahkan dengan menargetkan memperoleh laba bersih Rp42 miliar sepanjang 2012 ini.

"Kita targetkan untuk laba bersih bisa mencapai lima persen hingga enam persen dari pendapatan di 2012," ungkap Kasman Muhammad.

Untuk target pendapatan di 2012, perseroan optimistis bisa mencapai sekitar Rp600 miliar hingga Rp700 miliar. Nantinya pendapatan tersebut berasal dari target nilai kontrak di 2012 yang ditargetkan bisa mencapai di atas Rp1 triliun.

Salah satu kontrak yang sudah didapat yaitu persiapan untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) di Riau, Sumatera. Sementara setelah menyatakan perseroan untuk tidak jadi pailit, perseroan akan menjalankan beberapa proyek yang sempat tertunda diakibatkan persoalan kepailitan tersebut.

Adapun beberapa proyek yang akan dilanjutkan adalah proyek flyover di Riau senilai Rp79 miliar yang akan selesai pada April 2012, lalu proyek pembangunan jembatan di Surabaya senilai Rp40 miliar, pembangunan irigasi di Solo Rp60 miliar, dan juga proyek-proyek lainnya. **EB**

FORMULIR BERLANGGANAN

GARDA BUMN
MEDIA KOMUNIKASI, ADVOKASI, DAN EDUKASI PEKERJA BUMN

Formulir dikirim ke alamat Redaksi
Majalah GARDA BUMN
Gedung JAMSOSTEK Lt. 10
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 79,
Jakarta Selatan 12930
Telp. [021] 520 7797 Ext 4010
Fax. [021] 5202304
gardabumn@yahoo.com

■ Harga Belum Termasuk Biaya Pengiriman

Saya ingin dicatat sebagai pelanggan Majalah GARDA BUMN

Nama: _____

Perusahaan: _____

Alamat: _____

Telp./Fax: _____

Dengan Jumlah Eksemplar pada setiap edisi: (pilih salah satu)

☐ 25 eks Rp 250.000,- ☐ 50 eks Rp 500.000,- ☐ 75 eks Rp 750.000,-

Bank Agro Cabang Gedung Jamsostek, Rek. 01-30-34-0806 a/n Federasi SP BUMN

Contact Person

Rudi Firmansyah 0817 6661 966



Lorong Berliku Implementasi UU BPJS

SETELAH melalui proses panjang dan kontroversial, akhirnya RUU BPJS disahkan menjadi UU. Namun, implementasi UU ini tidaklah sedehana, sehingga membutuhkan waktu yang masih lama.

Akhirnya, Rancangan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) disahkan menjadi UU No 4 tentang BPJS. Pengesahan itu dilakukan pada 28 Oktober 2011, oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Agus Martowardojo.

Proses pembahasan RUU BPJS, sangat berliku, bagaikan memasuki sebuah labirin. Pandangan pro dan kontra, saling bersahutan dengan nyaringnya. Bahkan, kerap juga terjadi, penyampaian pandangan pro dan kontra itu dilakukan dalam

bentuk aksi demonstrasi. Maka, pantas saja jika pengesahan RUU BPJS, jauh melewati batas waktu yang ditetapkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Terbitnya UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS menjadi sangat penting untuk membuka peluang kelanjutan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional. Program SJSN tidak bisa berjalan karena belum adanya lembaga yang ditunjuk sebagai BPJS sesuai dengan UU SJSN. Disamping itu, masih diperlukan terbitnya banyak

peraturan perundangan dan regulasi lainnya, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) dan Keputusan Presiden (Keppres) untuk mendukung implementasi SJSN. Peraturan pelaksanaan UU SJSN memerlukan 11 PP dan 10 Perpres.

Namun, sampai saat ini peraturan yang sudah ada baru Perpres Nomor 44 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 110 tahun 2008 tentang organisasi dan keanggotaan DJSN. Dengan kata lain, harapan dan cita-cita untuk merealisasikan cakupan jaminan sosial kepada seluruh rakyat tidak akan terwujud jika berhenti pada terbitnya UU BPJS. Jika pembahasan UU melibatkan DPR dan Pemerintah, maka perumusan berbagai peraturan perundangan dan regulasi lainnya serta pelaksanaan SJSN menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah. Tindak lanjut UU BPJS



ini memerlukan adanya 8 PP, 7 Perpres dan 1 Keppres. Tantangan terbesar implementasi SJSN akan ditentukan oleh rampung dan beresnya sekian banyak peraturan perundangan & regulasi tersebut.

UU BPJS yang terdiri dari 16 bab dan 71 pasal ini dan sudah tercatat dalam Lembaran Negara merupakan amanat UU SJSN pasal 5 ayat 1 dan pasal 52, bahwa BPJS harus dibentuk dengan UU. UU BPJS sebagai lanskap kelembagaan dan pedoman tata kelola (*governance*) penyelenggaraan jaminan sosial memberi amanat pembentukan 2 BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan merupakan transformasi dari PT Askes (Persero), dan akan menyelenggarakan program jaminan kesehatan untuk seluruh penduduk (*universal coverage*), mulai berlaku pada tahun 2014. BPJS

Ketenagakerjaan akan ditransformasi dari PT Jamsostek (Persero), yang akan melaksanakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun. BPJS Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada juli 2015.

Tranformasi PT Askes menjadi BPJS Kesehatan yang menjangkau seluruh warga negara hanya dalam waktu 2 tahun ke depan merupakan tantangan besar bagi Pemerintah. Sebagai perbandingan, ketika Fidel Ramos mendirikan Philippine Health Corporation pada tahun 1995 menargetkan pencapaian *universal coverage* untuk jaminan kesehatan selama 15 tahun, namun hingga saat ini baru tercapai sekitar 70% penduduk. Sedangkan China berhasil mencapai *universal coverage* dalam waktu singkat dengan jalan mendirikan lembaga jaminan kesehatan di tingkat provinsi. Amerika Serikat masih menyisakan lebih dari 30 juta penduduknya yang masih belum tercakup dalam program pelayanan kesehatan yang diselenggarakan secara liberal.

Sedangkan di India, untuk menjangkau ratusan juta penduduk miskin, pemerintah mendirikan RSBY, suatu program kesehatan bagi masyarakat miskin (sudah mencapai 300 juta penduduk). RSBY ini program yang hampir sama seperti Jamkesmas di Indonesia, yang sudah melindungi 76 juta penduduk). Dengan jumlah penduduk kita yang mencapai 237 juta dengan diselenggarakan oleh satu BPJS Kesehatan akan membutuhkan kapasitas kelembagaan yang luar biasa.

Tercapainya *universal coverage* untuk jaminan kesehatan yang akan diselenggarakan BPJS Kesehatan, tidak hanya menyangkut tersedianya

kerangka legal, coordination of benefit, kapasitas kelembagaan, tapi juga menyangkut pembiayaan dari APBN karena masih besarnya jumlah penduduk miskin dan tidak mampu, yang nanti akan dirumuskan dalam bentuk PBI (Penerima Bantuan Iuran). Migrasi program JPK Jamsostek ke BPJS Kesehatan juga akan menjadi tantangan tersendiri, karena selama ini program JPK Jamsostek sifatnya "gratis" kepada pekerja karena iuran-nya ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha, sedangkan dalam BPJS Kesehatan, pekerja akan dibebani iuran untuk jaminan kesehatan. Jamkesda di berbagai daerah yang keberadaannya dipayungi oleh Keputusan MK tahun 2005, membutuhkan proses integrasi yang tidak mudah kedalam BPJS Kesehatan karena akan bersinggungan dengan kewenangan dalam kerangka otonomi daerah.

Demikian juga, transformasi PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan akan memiliki tantangan tersendiri. Dari segi program, harus melakukan migrasi program JPK ke BPJS Kesehatan, tetap melaksanakan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan menambah pelaksanaan program pensiun. Namun sialnya, program pensiun yang tercantum didalam UU SJSN merupakan program Pensiun manfaat pasti, sehingga pasti sangat memberatkan pengusaha dan badan penyelenggara. Pelaksanaan jaminan pensiun ini pasti tidak mudah karena pengusaha sudah berteriak tidak mampu jika dibebani tambahan iuran yang sangat signifikan. Selama ini, memang terdapat tumpang tindih dan memerlukan harmonisasi & sinkronisasi diantara program JHT (UU Jamsostek), Pesangon (UU

S A J I A N K H U S U S

Ketenagakerjaan), UU Dana Pensiun dan Pensiun “manfaat pasti” (UU SJSN).

Keberadaan BPJS

Ketenagakerjaan yang menjangkau seluruh pekerja juga tidak mudah. Menilik pengalaman PT Jamsostek selama lebih 34 tahun, sampai saat ini baru mencapai sekitar 10 juta peserta aktif, dari jumlah pekerja formal yang mencapai 35 juta dan pekerja informal yang berjumlah 70 juta, membutuhkan strategi, kapasitas kelembagaan dan penegakan hukum yang efektif. Jika BPJS Ketenagakerjaan dapat menjangkau peserta secara signifikan, maka jaminan sosial tidak hanya bisa melindungi pekerja dan keluarganya tapi dapat berperan dalam mengakumulasi dana investasi yang besar sehingga dapat berperan dalam perekonomian nasional.

Disamping pembentukan 2 BPJS, didalam UU ini menetapkan PT Taspen dan PT Asabri yang selama ini menyelenggarakan jaminan sosial untuk PNS dan TNI/Polri, akan ditransformasi ke BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2029. Karena waktunya masih sangat lama, bisa dikatakan posisi PT Taspen dan Asabri relatif tidak ada perubahan. Perbedaan proses waktu yang diperlukan untuk transformasi dari 4 BUMN yang existing ini cukup menarik dikaji mengenai pertimbangan dan latar belakangnya.

Jika kita mencermati pembentukan 2 BPJS ini, maka pilihan ini cukup akomodatif karena melihat tajamnya perbedaan pendapat dalam pembahasan di DPR, apakah BPJS akan memilih pendekatan program atau kepesertaan. Implikasi program dan kelembagaan dengan membentuk 2



BPJS dengan pendekatan program (BPJS Kesehatan) dan kepesertaan (BPJS Ketenagakerjaan) sekaligus relatif mengurangi timbulnya kompleksitas yang akan merusak bangunan sistem jaminan sosial yang sudah berjalan. Besarnya penolakan public, terutama pekerja dan pengusaha, terhadap peleburan 4 BUMN jaminan sosial dan ancaman pekerja untuk menarik JHT yang bisa memicu dampak sistemik terhadap perekonomian, tampaknya efektif untuk tidak meneruskan wacana pembentukan BPJS jangka pendek, yang akan menyelenggarakan program jaminan kesehatan, kecelakaan kerja dan jaminan kematian, dan BPJS jangka panjang sebagai penyelenggara jaminan hari tua dan pensiun.

Selain pembentukan 2 BPJS, hal penting yang tertuang dalam UU BPJS adalah status hukum badan penyelenggara jaminan sosial, yang ditransformasi dari BUMN menjadi Badan Hukum Publik, yang akan menuntun BPJS untuk berjalan sesuai dengan 9 prinsip SJSN, yaitu kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-

hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta. BUMN jaminan sosial sudah melaksanakan 9 prinsip SJSN sehingga secara teknis dan tata kelola relatif tidak ada masalah.

BPJS nantinya tidak lagi berada dibawah kontrol Kementerian BUMN tetapi bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sedangkan Dewan Pengawas BPJS akan menjalani tahap fit & proper test oleh DPR, persis seperti menentukan pimpinan KPK, Gubernur & Deputy BI, Panglima TNI dan lembaga publik lainnya. Jadi kalau sebelumnya, penentuan Dewan Komisaris & Direksi berada dalam lingkup Kementerian BUMN dalam lingkup Pemerintah, maka dalam era BPJS penentuan pengelola akan lebih terbuka dan politis karena akan melibatkan Pansel, DPR dan Presiden.

Jika merujuk pada laporan ISSA (2010), ada beberapa prioritas bagi badan penyelenggara jaminan sosial agar dapat terus bertahan,

SAJIAN KHUSUS



PENDUDUK INDONESIA DENGAN JAMINAN KESEHATAN, 2010

Penduduk	Jumlah (Jiwa)
Dengan Jaminan Kesehatan	139.424.348
Tanpa Jaminan Kesehatan	96.610.130
Jumlah Penduduk	236.034.478

Sumber : PPJK Depkes RI, 2011 (diolah)

PENDUDUK INDONESIA BERDASARKAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN, 2010

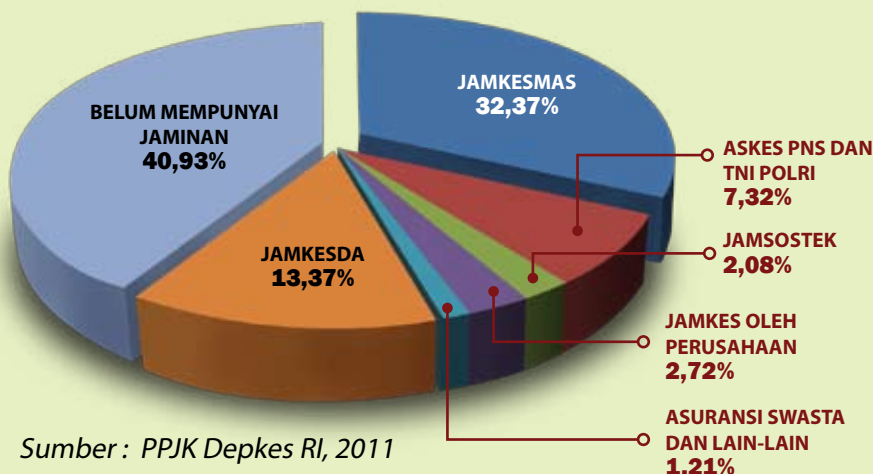
Program	Jumlah (Jiwa)
Jamkesmas	76.400.000
Jamkesda	31.564.006
ASKES PNS dan TNI POLRI	17.274.520
JPK Jamsostek	4.900.569
Asuransi Swasta dan Lain	2.856.539
Jamkes Perusahaan	6.428.714
Total	139.424.348

Sumber : PPJK Depkes RI, 2011 (diolah)

berkembang dan berjalan dengan baik, yaitu mampu memperluas kepesertaan (*extension of coverage*), menjaga pendanaan yang berkelanjutan (*financial sustainability*) dan mengembangkan tata kelola yang baik (*good governance*). Jadi terbitnya UU BPJS harus juga memastikan berdirinya BPJS yang bisa memenuhi hal-hal tersebut.

Usaha untuk mewujudkan SJSN bagi seluruh rakyat pasti tidak mudah. Apalagi pro kontra terhadap SJSN sudah muncul sejak awal

PROFIL PENDUDUK INDONESIA DENGAN JAMINAN KESEHATAN, 2010



Sumber : PPJK Depkes RI, 2011

hingga hari ini. Bahkan sejak awal UU BPJS digodok mungkin banyak rakyat yang merasa dan berhak secara langsung akan mendapatkan 5 program jaminan sosial ini. Padahal faktanya dalam sejarah sistem jaminan sosial dimanapun, selalu berjalan bertahap dan sistematis, baik dari aspek cakupan peserta maupun program. Karena itu, tidak ke depan tidak hanya dibutuhkan harmonisasi & sinkronisasi peraturan perundangan dan regulasi yang ada, tapi mutlak diperlukan sosialisasi dan edukasi agar mereka dapat menjadi pemangku kepentingan yang bertanggung jawab (*responsible stakeholders*). **EB**

>> Dahlan Iskan, Menteri BUMN

PRIBADI YANG FOKUS PADA

Bekerja keras, efektif, dan tidak begitu peduli pada penampilan atau protokoler birokrasi. Itulah bagian dari *style* Dahlan Iskan. Mantan jurnalis ini, segera menjadi pusat perhatian, ketika diangkat menjadi Menteri BUMN karena gerakan lincahnya, mengingatkan orang pada sosok Adam Malik.

KETIKA hasil *reshuffle* Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan, Oktober 2011 lalu, masyarakat banyak yang menyampaikan ketidakpuasannya. Tapi, masuknya Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN menggantikan Mustafa Abubakar, menjadi kekecualian yang kontras. Publik menyambut kehadiran mantan Direktur Utama (Dirut) PT PLN itu, dengan antusias.

Dahlan Iskan, yang punya sikap *nothing to lose*, dipercaya bisa menjadi tembok tebal bagi kekuatan manapun, yang berniat merongrong BUMN. Lebih dari itu, Dahlan Iskan adalah tipe pekerja tulen, yang tak segan-segan menerabas hambatan birokrasi dan protokoler, untuk efektifitas tugas yang diembannya.

Tengok saja, bagaimana sibuknya Dahlan Iskan, tidak lama setelah melakukan serah terima jabatan (sertijab) dengan Mustafa Abubakar. Ia langsung menggelar pesta perpisahan dengan direksi PT PLN secara sederhana di Sate Kambing Pejompongan. Setelah itu, ia mengunjungi semua ruang staf dan pejabat di Kementerian BUMN.

Sore itu juga, Dahlan langsung menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) pertama. Dalam rapat itu, ia menyatakan bahwa sebagai Menteri ia tidak akan mengangkat Staf Khusus Menteri, meski secara ketentuan, itu memungkinkan. Dan malamnya, sekitar pukul 20.00 WIB, Dahlan sudah langsung bergerak ke Bali, untuk kemudian menyeberang ke Lombok. Di Lombok, Dahlan mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan *groundbreaking*



pembangunan kawasan pariwisata terpadu Mandalika.

Di sela-sela mendampingi Presiden, Dahlan juga menyempatkan diri berkoordinasi dengan Dirut PT Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II, termasuk direksi PT Bali Tourism Development Corporation (BTDC). Sekembali dari Lombok, Dahlan langsung melakukan rapat dengan para deputinya. Selanjutnya, pada Sabtu (22/10) Dahlan bertolak ke Sumatera Utara, melakukan kunjungan kerja ke Nias. Dahlan menyertakan sejumlah direksi seperti Dirut PT Kereta Api Indonesia, PT ASDP Indonesia Ferry, dan PT Jasa Marga.

Sambil menginap di Pulau Nias, Dahlan pada malam harinya melakukan diskusi rileks, namun sangat produktif, dengan para direksi terkait pembangunan yang melibatkan BUMN di kawasan itu.

Tidak cukup sampai di situ, Minggu

(23/10) pagi, Ketua Umum GABSI (Gabungan Bridge Seluruh Indonesia) ini pun bergerak menuju Medan. Di ibukota Provinsi Sumatera Utara itu, Dahlan memanggil direksi PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I, II, III, dan IV serta PT Kawasan Industri Medan, PT Pupuk Iskandar Muda. Ia kembali ke Jakarta Minggu sore, namun Dahlan juga 'dihadang' permintaan pertemuan oleh Dirut PT Pelindo II, RJ Lino, yang melaporkan berbagai program pengembangan Pelindo II.

Itu soal gambaran etis kerja seorang Dahlan Iskan. Sedangkan kesederhanaannya, sudah banyak diperbincangkan ketika pelantikan, dan sertijab. Dalam acara sertijab, yang berlangsung di lantai 21 KBUMN, dengan santainya Dahlan hanya berkemeja putih dengan lengan digulung, tanpa jas, dan tetap setia bersepatu kets hitam. "Saya sudah terbiasa 30 tahun memakai sepatu kets, sejak jadi wartawan," akunya. Tidak sampai di situ saja, Dahlan pun tidak menggunakan keistimewaan seorang Menteri untuk menggunakan lift khusus, sebagaimana yang selama ini berlaku. Satpam yang biasa memberi hormat ketika bersua dengannya, dimintanya untuk tidak lagi memberi hormat dengan cara seperti itu. Dan satu hal lagi, ia tak mau dipanggil Pak Menteri. "Jangan panggil saya Pak Menteri, panggil saya Pak Dahlan. Itu nama saya," katanya.

Hal unik lainnya, ia berkeinginan untuk tidak menggunakan fasilitas sebagai Menteri, antara lain gaji, rumah dinas dan mobil dinas, sebagaimana yang ia lakukan di PLN. Pun ia ingin jalan kaki ke Kementerian BUMN dari rumahnya, di kawasan SCBD, Sudirman.

Dua hari setelah dilantik, Dahlan Iskan makan siang di kantin Diesel di halaman parkir belakang KBUMN, yang biasa tempat makan para pegawai KBUMN. Sepertinya, hanya Menteri Negara BUMN bernama Dahlan Iskan yang bisa melakukan itu. Bahkan para pejabat Eselon I KBUMN

KERJA

rasa-rasanya tak pernah menginjakkan kaki ke kantin itu. Namun, mantan Dirut PT PLN ini melakukannya tanpa beban.

Sebenarnya, Dahlan Iskan sudah mencoba untuk menghindari dari 'keributan' *reshuffle*. Ia sudah siap-siap *boarding*, menuju Amsterdam. Ia memang tidak ingin jadi Menteri. Dahlan sudah terlanjur cinta pada PLN. Ia seakan menemukan kegairahan dan merasa muda lagi melihat perkembangan PLN. "Padahal dulu saya benci PLN matimatian," akunya. Di saat seperti itulah tiba-tiba ada suara: "Ini ada telpon untuk Pak Dahlan," ujar salah seorang keluarganya, yang akan sama-sama ke Eropa, sambil menyodorkan HP. Telepon pun ia terima. Ia kemudian tercenung. "Tidak boleh berangkat! Ini perintah Presiden!" suara seseorang dari balik telepon itu terdengar dengan jelas. "Wah, saya kena cekal," kata Dahlan dalam hati, sambil berguyon.

Meski pekerja keras, Dahlan Iskan memang tidak kehilangan sisi humorisnya.

Dahlan, misalnya, pernah bercerita tentang hari kelahirannya yang sangat spesial. Spesial lantaran tanggal itu dipilihnya sendiri, karena orang tuanya tidak punya catatan kelahirannya. Sebenarnya, sampai tamat SMA, Dahlan belum peduli dengan tanggal lahir dan karena itu juga tak pernah bertanya ke bapaknya.

Hidup di desa, 17 km dari Magetan, waktu itu, tidak ada administrasi yang memerlukan tanggal lahir. Ketika sudah amat dewasa, Dahlan pun bertanya kepada bapaknya mengenai tanggal lahir itu. Jawabnya tegas: Selasa Legi! Tapi, bukankah setiap 35 hari ada Selasa Legi? "Waktu itu," kata bapaknya sambil berpikir keras, "Ada hujan abu yang sangat hebat". Maksudnya ketika itu Gunung Kelud meletus. Begitu hebatnya, sampai desanya yang jaraknya lebih 100 km dari gunung di Blitar itu dalam keadaan gelap selama sepekan. Ia pun tak melakukan riset, kapan saja Gunung Kelud meletus. Baginya, tidak tahu tanggal lahir tidak penting-penting amat. Ia pun memutuskan sendiri: lahir tanggal 17 Agustus 1951. Itulah tanggal lahir yang secara resmi dipakainya di dokumen apa pun sampai sekarang.

Dahlan berasal dari keluarga tidak

mampu. Karir Dahlan dimulai dari menjadi calon reporter di salah satu surat kabar kecil di Samarinda, Kalimantan Timur pada 1975. Setahun kemudian, Dahlan menjadi wartawan Majalah Tempo. Tahun 1976, ketika pimpinan Majalah Tempo Jawa Timur pensiun, ia ditugaskan ke Surabaya.

Waktu itu Majalah Tempo membeli Jawa Pos, dan pada 1982 Dahlan ditunjuk memimpin surat kabar Jawa Pos hingga sekarang. Ia kemudian menjadi pemegang saham Jawa Pos tersebut. Di tangan Dahlan, Jawa Pos yang saat itu hampir mati bisa bangkit, kini sudah menjadi raksasa media dengan jaringan sangat luas. **EB**

Curriculum Vitae

Nama : Dahlan Iskan
Lahir : Magetan, Jawa Timur, 17 Agustus 1951
Agama : Islam
Jabatan : -Menteri BUMN 19 Oktober - sekarang
 Chairman Jawa Pos Grup, 2000 - sekarang
Pendidikan : - Fakultas Hukum IAIN Sunan Ampel
 - Minout Indonesia LPPM (1979)
 - FINNON LPPM (1980).

KARIER:

1. Wartawan majalah Tempo (1976)
2. Pemimpin surat kabar Jawa Pos sejak 1982
3. Komisaris PT. Fangbian Iskan Corporindo (FIC) 2009
4. Direktur Utama Perusda PT. PWU Jatim Group (2000)
5. Komisaris pabrik kertas Adiprima Suraprinta
6. Komisaris Power Plant PT. Prima Elektrik Power di Surabaya
7. Direktur Utama Power Plant PT. Cahaya Fajar Kaltim
8. Komisaris Kaltim Elektrik Power
9. Ketua Umum Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) se-Indonesia
10. CEO Jawa Pos Group, 2000
11. Direktur Utama PLN 23 Desember 2009 - 19 Oktober 2011



Judul Buku : FTransformasi BUMN Menuju Pentas Global
Penulis : Metta Dharmasaputra, *et all*
Penerbit : PT Tempo Inti Media
Cetakan : Pertama, Oktober 2011
Tebal : 236 halaman



REKAM JEJAK TRANSFORMASI BUMN

PANDANGAN sinis terhadap BUMN; tidak profesional, birokratis, lamban, sarang korupsi, dan sebagainya, sudah mulai menyusut. Bahkan nyaris tak terdengar lagi. Faktanya BUMN sudah banyak yang melakukan transformasi, menjadi korporat yang siap bermain di kancah ekonomi global.

Buku ini, menampilkan 23 BUMN yang telah berhasil melakukan transformasi tersebut, yaitu PT PLN, PT Telkom, PT Antam, PT BRI, PT Pertamina, PT Pelindo II, PT Krakatau Steel, PT BNI, PT Bukit Asam, PT BTN, PT ASKES, PT Bank Mandiri, PT Garuda Indonesia, PT Jamsostek, PT Angkasa Pura II, PT Timah, PT Wijaya Karya, PT Kereta Api Indonesia, PT Jasa Marga, PT Biofarma, PT INTI, PT Perhutani IV, dan PT Pupuk Sriwidjaja.

Setiap BUMN diulas dengan lugas kemampuannya dalam mendongkrak kinerja, dengan langkah-langkah terobosan yang dilakukannya. Kemudian, dilengkapi oleh wawancara dengan Direktur Utama BUMN bersangkutan, yang menjelaskan secara langsung tentang strategi yang dijalankan. Karena itu, buku ini juga

sekaligus memaparkan semacam *best practice* tentang pengelolaan sebuah perusahaan, yang mampu menembus berbagai tantangan berat, hingga melesat ke puncak tinggi kinerja bisnisnya.

Materi buku ditulis dengan bahasa yang renyah khas *Tempo*, dengan ilustrasi foto yang hampir mencapai 50 persen dari keseluruhan space buku. Jadi, secara visual, buku berukuran 20,5 x 27 cm ini, cukup memanjakan mata pembaca.

Transformasi BUMN dengan hasil yang sudah mulai kelihatan, tentu saja, menerbitkan harapan yang baik untuk masa depan ekonomi Indonesia. Sebab faktanya, sejak republik ini berdiri, peran BUMN sangat besar dalam menggerakkan perekonomian nasional. Sekarang, dengan total aset mencapai Rp 2.500 triliun, BUMN masih memainkan peran penting sebagai salah satu lokomotif perekonomian nasional, bahkan memberikan kontribusi sangat besar (meskipun belum maksimal) pada negara.

Sebagai gambaran, pada 2010 total pajak yang disetor BUMN mencapai Rp 100 triliun, plus deviden

Rp 30 triliun. Sedangkan di pasar modal, BUMN berkontribusi hampir seperempatnya, dari total kapitalisasi Rp 3.100 triliun. Padahal, dari 142 BUMN yang sudah *listing* di bursa, baru 18 BUMN. Buku ini menyajikan data yang dibuat dalam bentuk grafik menarik.

Proses transformasi BUMN yang dilakukan pemerintah —tepatnya Kementerian BUMN— hingga saat ini, memang belum membuahkan hasil yang maksimal. Namun, fondasi kokoh sudah diletakkan. Di atas fondasi inilah, kelak proses tranformasi diharapkan terus berlanjut, hingga menggapai target total asset Rp 11.000 triliun. Salah satu hal paling penting dalam proses peletakkan fondasi itu adalah, membebaskan BUMN dari intervensi kepentingan politik, yang selama ini menjadi ganjalan paling serius bagi pengembangan bisnis BUMN.

Prakata yang ditulis untuk buku ini, sangat menarik. Mengutip pepatah kuno Tiongkok, “Lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan”, sangat relevan untuk melihat keadaan BUMN sekarang ini. Tanpa mengabaikan arti penting kritik yang selama ini banyak menghujam BUMN, melihat fakta sejumlah BUMN yang sukses melakukan transformasi hingga tidak terdapat lagi bermain di pentas global, tentu akan memberikan perspektif bagi bagi kita dalam memandang BUMN dan masa depan ekonomi negeri ini.

Kendati fondasi pengembangan BUMN sudah diletakkan, memang tidak ada jaminan semuanya akan berjalan mulus. Namun, langkah sudah diayunkan. Dan, mengutip pepatah Tiongkok lainnya, “Perjalanan seribu li, selalu dimulai dengan langkah pertama.” **GB**

Selamat Datang, Pak Dahlan

ABDUL LATIF ALGAFF
Ketua Umum FSP BUMN

BAGI PEKERJA BUMN, sosok seperti Dahlan Iskan sudah lama dinantikan untuk memimpin Kementerian BUMN. Sudah menjadi rahasia umum, selama ini BUMN sangat rentan terhadap rongrongan berbagai pihak, terutama yang berkuasa atau dekat dengan kekuasaan. Dalam kalimat yang lebih populer, BUMN kerap dijadikan “sapi perah”.

Rongrongan pada BUMN tersebut, terus saja berlangsung, meskipun Menteri BUMN beberapa kali berganti. Tidak ada menteri yang mampu menghalau rongrongan itu, karena memang selalu ada kekuatan besar di belakangnya. Yang bisa dilakukan, mungkin hanya meminimalisirnya.

Dahlan Iskan adalah Menteri BUMN dengan pribadi yang sangat berbeda. Sikapnya yang cenderung *nothing to lose*, bahkan menolak sejumlah fasilitas yang menjadi haknya sebagai menteri, tentu membuat segan bagi siapa saja yang berniat untuk merongrong, seperti menitipkan orangnya menjadi direksi, atau meminta proyek, dan sebagainya.

Namun, di atas semua itu, dahlan hadir memimpin Kementerian BUMN dengan kompetensi yang tidak diragukan lagi. Prestasinya saat menjadi Direktur Utama PT PLN, merupakan fakta telanjang yang bisa dilihat dengan mudah. Dengan penga-

lamannya memimpin sebuah BUMN, Dahlan juga tentu tahu persis, apa yang dibutuhkan sebuah BUMN agar bisa menggenjot kinerja bisnisnya.

Dengan gaya kepemimpinannya yang cenderung *straight*, membebaskan diri dari keruwetan birokrasi dan protokoler, niscaya akan membuat direksi di setiap BUMN untuk selalu “terjaga”, bekerja dengan intensitas lebih tinggi. Seperti sudah sering terjadi, tidak pernah bisa diduga, kapan Dahlan melakukan sidak, menelisik keadaan bisnis BUMN di lapangan secara *on the spot*.

Dari sekian banyak langkah “mengejutkan” yang sudah diayunkan Dahlan Iskan, yang paling strategis tentu saja kebijakan pendelegasian wewenang. Melalui Kepmen No. 236, Menteri Dahlan Iskan memereteli sejumlah kewenangannya, serta memberi keleluasaan pada direksi dan komisaris BUMN dalam pengambilan keputusan bisnis.

Kebijakan tersebut, tentu saja diterbitkan dengan pertimbangan sangat matang. Dan, memang, bisa berdampak signifikan terhadap peningkatan kinerja BUMN, karena perusahaan dapat bergerak lebih lincah. Namun, seperti pisau bermata dua, kebijakan itu juga bisa menimbulkan dampak buruk. Dengan keleluasaan yang dimilikinya, komisaris dan direksi BUMN yang tidak amanah, tentu saja akan lebih

mudah untuk melakukan penyimpangan, memanfaatkan asset dan bisnis BUMN untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Tentu saja, Kementerian BUMN sudah memiliki resep untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyimpangan yang sangat merugikan tersebut. Namun, hendaknya jangan dilupakan juga pentingnya upaya memperkuat kontrol internal. Salah satunya yang sangat strategis, adalah melalui Serikat Pekerja (SP) sebagai wadah pekerja BUMN. Keberadaan SP di setiap BUMN, niscaya akan menjadi salah satu sarana kontrol yang efektif, untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan di perusahaan.

Karena itu, Kementerian BUMN hendaknya aktif melakukan upaya serius untuk mendorong terciptanya hubungan industrial yang baik di setiap BUMN, dengan memaksimalkan peran SP. Sekarang ini, sebagian besar BUMN memang sudah ada SP. Namun, masih ada direksi BUMN yang menempatkan SP dalam posisi pingiran, sehingga perannya tidak maksimal. Bahkan, ada BUMN yang belum mempunyai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang merupakan mahkota hubungan industrial.

Tanpa bermaksud mengecilkan peran kelompok lain termasuk direksi dan komisaris, para pekerja adalah kelompok yang bisa dipastikan mempunyai kepedulian sangat tinggi terhadap peningkatan kinerja dan masa depan perusahaan. Sebab, bagi mereka, perusahaan adalah merupakan sarana untuk mengaktualisasikan kompetensinya, sekaligus menjadi sumber nafkah keluarga. Para direksi dan komisaris BUMN, boleh datang dan pergi. Tapi, sebagian besar pekerja BUMN, memiliki pengabdian yang panjang di BUMN-nya masing-masing.

Semoga Menteri Dahlan Iskan telah memasukkan upaya membangun hubungan industrial yang harmonis, sebagai salah satu program yang penting untuk diimplementasikan secara konsisten. **EB**



JAMSOSTEK

PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero)



MELINDUNGI dengan PASTI

JAMSOSTEK memberi kepastian perlindungan
setiap pekerja dengan jaminan Kecelakaan Kerja,
Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.



www.jamsostek.co.id